BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan

- 1) Pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan insentif pajak salah satunya adalah insentif PPN. KPP Pratama Pare selaku unit kerja DJP menjadi salah satu penyalur informasi DJP kepada masyarakat Kabupaten Kediri dan Nganjuk. Upayanya dalam menyampaikan edukasi dan informasi terkait insentif Pajak Pertambahan Nilai di masa pandemi telah dilakukan dengan baik. Penyuluhan gencar dilakukan oleh KPP Pratama Pare dengan melaksanakan dua metode yaitu penyuluhan langsung secara aktif melalui siaran radio, kelas pajak daring maupun luring dan penyuluhan tidak langsung satu arah melalui unggahan media sosial milik KPP Pratama Pare.

Tim penyuluh KPP Pratama Pare menyampaikan informasi mulai dari dasar hukum insentif pajak masa pandemi, bentuk-bentuk insentif pajak tersebut, tata cara pemanfaatannya, pihak-pihak yang dapat memanfaatkan insentif, dan memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak yang ingin mengajukan pertanyaan. Namun, jangkauan penyuluhan yang kurang merata, penyampaian

materi melalui kelas pajak daring yang tidak optimal, dan stigma buruk masyarakat kerap kali menjadi tantangan bagi Tim Penyuluh KPP Pratama Pare.

- 2) Pemanfaatan insentif yang berlangsung mulai tahun pajak 2020 hingga saat penelitian dilakukan dirasa masih kurang optimal. Dibuktikan dengan sedikitnya jumlah KLU yang memanfaatkan insentif PPN. Sedikitnya jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan ini dikarenakan segmentasi dari kebijakan. Namun meski demikian, secara keseluruhan nilai realisasi yang dicapai cukup tinggi. Untuk realisasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tahun 2020 mencapai Rp.2.154.028.129, Pajak Pertambahan Nilai DTP atas penyerahan barang dan jasa untuk penanggulangan Covid-19 tahun 2020 sebesar Rp.288.557.722 sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.278.173.901, dan Insentif Pajak atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun tahun 2021 sebesar Rp.976.692.551
- 3) Kendala yang dihadapi oleh Wajib Pajak selama memanfaatkan insentif PPN seperti adanya kebijakan insentif pajak yang cenderung berubah beberapa kali sehingga membuat Wajib Pajak harus selalu mencari informasi terbaru terkait insentif dan mengalami kesulitan memisahkan barang dan jasa yang digunakan dalam penanganan Covid-19 karena pengadaan barang dan jasa antara untuk penggunaan penanganan Covid-19 dan penanganan yang lain tidak terpisahkan.

4.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada identifikasi upaya KPP setempat, identifikasi pemanfaatan insentif PPN, dan kendala yang dialami wajib pajak dalam memanfaatkan salah satu insentif PPN. Dalam penelitian ini tidak menyebutkan secara khusus insentif PPN yang diteliti sehingga penelitian masih bersifat luas. Maka penelitian lebih khusus terkait insentif PPN dapat dijadikan sebagai topik pembahasan dalam penelitian selanjutnya.

4.3 Saran

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan saran yang dapat disampaikan berupa pelaksanaan penyuluhan terkait kebijakan perpajakan dilakukan secara berkala mengikuti perubahan aturan yang terjadi sehingga masyarakat dapat menerima informasi terbaru sekaligus alat pendukungnya seperti aplikasi terkait kebijakan pemerintah yang bersangkutan. Meminimalisir perubahan Peraturan Menteri Keuangan sehingga masyarakat mampu memahami dengan baik aturan terkait kebijakan tersebut.